



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 25-K/ PM.II-09/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jakri.
Pangkat / NRP : Kopda / 31000180050380.
Jabatan : Tamudi-2 pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0622/ Kab.Sukabumi.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 28Maret 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cicadas Kp. Ciwangi Desa Cikundul Kota Sukabumi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/1Bogor Nomor BP-15/A-09/V/2018 Bulan Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor Kep/14/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/393/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 25-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 25-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Taptera 25-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/393/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa surat dari Dandim 0622/ Kab. Sukabumi Nomor B/157/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang menerangkan Kopda Jakri NRP 31000180050380 Tamudi-2 Pok Tuud Kodim 0622/Kab. Sukabumi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/393/K/AD/II-08/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Ma Kodim 0622/Kab. Sukabumi bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018, yang ditandatangani Pasi Pers Kapten Inf Iskandar NRP 572974.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketahui Terdakwa a.n Kopda Jakri NRP 31000130050380, Tamudi-2 Pok Tuud Kodim 0622/Kab. Sukabumi tanggal 8 Mei 2018 dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan

Hal 2 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berakudberdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/311/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/497/IV/2019 tanggal 9 April 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/608/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Dandim 0622/ Kab. Sukabumi Nomor B/157/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Jakri NRP 31000180050380 Tamudi-2 Pok Tuud Kodim 0622/Kab. Sukabumi sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara *in absentia* sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara *In Absentia*.

5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absentia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018, setidsak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Kodim 0622/Kab. Sukabumi, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Jakri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinastif aktif di Kodim 0622/Kab Sukabumi dengan pangkat Kopda NRP 31000180050380.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Serma Arif Nurwandi (Saksi-1) bersama Koptu Nikmatulloh (Saksi-2) berserta anggota yang lainnya sedang melaksanakan apel pagi di lapangan apel Ma Kodim 0622/Kab Sukabumi ternyata Terdakwa tidak hadir saat apel pagi tersebut tanpa keterangan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi Kesatuan, sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintah Saksi-1, Saksi-2, Staf Intel dan Staf Kodim 0622/ Kab. Sukabumi ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Santiong Kel. Cipanengah Kec. Lembur Situ Kota Sukabumi dan beberapa tempat/teman-teman yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, dan menurut keterangan dari istri Terdakwa bernama Rika Susianti kalau Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinastif sebagai Prajurit.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/ 1-2 Sukabumi atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arif Nurwandi.
Pangkat, NRP : Serma, 3920623521270.
Jabatan/Pekerjaan : Kapok Tuud.
Kesatuan/Instansi : Kodim 0622/Kab. Sukabumi.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 15 Desember 1970.

Hal 4 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gang Kutilang Tengah Rt. 05/04 Desa Gunung Batu Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kodim 0622/Kab Sukabumi, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Saksi bersama dengan Koptu Nikmatullah (Saksi-2) beserta anggota yang lainnya sedang melaksanakan apel Ma Kodim 0622/Kab Sukabumi, Saksi tidak melihat Terdakwa apel pagi, setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi menerima laporan dari Saksi-2 mengatakan Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sampai keesokan harinya Terdakwa tidak juga hadir tanpa keterangan dengan alasan tidak jelas.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintah Saksi bersama Saksi-2, anggota Satf 1/Intel dan anggota dari Intel Kodim 0622/Kab Sukabumi ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Santiang Kel. Cipanengah Kec. Lembur Situ Kota Sukabumi dan beberapa tempat / teman-teman yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, dan menurut keterangan dari istri Terdakwa kalau Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi sebagai Prajurit TNI AD.
5. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa belum lama, kurang lebih baru 10 (sepuluh) bulan, dalam kedinasan kelakuan Terdakwa biasa-biasa saja, agak tertutup dan tidak memiliki prestasi.
6. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Saksi ke-2 :

Nama lengkap : Nikmatulloh.
Pangkat, NRP : Koptu, 31000500570879.
Jabatan/Pekerjaan : Ta Provoost.
Kesatuan/Instansi : Kodim 0622/Kab. Sukabumi.
Tempat, tanggal lahir : Serang, 16 Agustus 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cikidang Rt.02/03 Desa/Kec.Cikidang Kab.Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kodim 0622/Kab Sukabumi, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi bersama dan Serma Arif Nurwandi beserta anggota yang lainnya sedang melaksanakan apel di lapangan apel Ma Kodim 0622/Kab Sukabumi, saat Saksi melakukan pengecekan apel pagi tidak melihat Terdakwa apel pagi, setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi melaporkan kepada Kapok Tuud Kodim 0622/Kab Sukabumi Serma Arif Nurwandi (Saksi-1) dan sampai keesokan harinya Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dengan alasan tidak jelas.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan, sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatan sehari-harinya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintah Saksi, Saksi-1, Staf Intel dan Staf Kodim 0622/Kab. Sukabumi ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Santiang Kel. Cipanengah Kec. Lembur Situ Kota Sukabumi dan beberapa tempat/ teman-teman yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan, dan menurut keterangan dari istri Terdakwa bernama Rika Susianti kalau Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinias sebagai Prajurit.

5. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa belum lama, kurang lebih baru 10 (sepuluh) bulan, dalam kedinasan kelakuan Terdakwa biasa-biasa saja dan agak tertutup juga tidak memiliki prestasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Ma Kodim 0622/Kab. Sukabumi bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018, yang ditandatangani Pasi Pers Kapten Inf Iskandar NRP 572974.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketahui Terdakwa a.n Kopda Jakri NRP 31000130050380, Tamudi-2 Pok Tuud Kodim 0622/Kab. Sukabumi tanggal 8 Mei 2018 dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi.

Hal 6 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barangbukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Jakri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0622/Kab Sukabumi dengan pangkat Kopda NRP 31000180050380.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Serma Arif Nurwandi (Saksi-1) bersama Koptu Nikmatulloh (Saksi-2) berserta anggota yang lainnya sedang melaksanakan apel pagi di lapangan apel Ma Kodim 0622/Kab Sukabumi ternyata Terdakwa tidak hadir saat apel pagi tersebut tanpa keterangan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi Kesatuan, sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintah Saksi-1, Saksi-2, Staf Intel dan Staf Kodim 0622/ Kab. Sukabumi ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Santiong Kel. Cipanengah Kec. Lembur Situ Kota Sukabumi dan beberapa tempat/teman-teman yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, dan menurut keterangan dari istri Terdakwa bernama Rika Susianti kalau Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinis sebagai Prajurit.

5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/ 1-2 Sukabumi atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang

Hal 7 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Jakri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Kodim 0622/Kab Sukabumi dengan pangkat Kopda NRP 31000180050380.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 061/Suryakancanaselaku Papera Nomor : Kep/14/VIII/2018 tanggal

Hal 8 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2018, menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Kodim 0622/Kab. Sukabumi dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Serma Arif Nurwandi (Saksi-1) bersama Koptu Nikmatulloh (Saksi-2) berserta anggota yang lainnya sedang melaksanakan apel pagi di lapangan apel Ma Kodim 0622/Kab Sukabumi ternyata Terdakwa tidak hadir saat apel pagi tersebut tanpa keterangan dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan
2. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi Kesatuan, sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintah Saksi-1, Saksi-2, Staf Intel dan Staf Kodim 0622/ Kab. Sukabumi ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Santiong Kel. Cipanengah Kec. Lembur Situ Kota Sukabumi dan beberapa tempat/teman-teman yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, dan menurut keterangan dari istri Terdakwa bernama Rika Susianti kalau Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinast sebagai Prajurit.
4. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan

Hal 9 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Subdenpom III/ 1-2 Sukabumi atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/ 1-2 Sukabumi atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/ 1-2 Sukabumi atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Hal 10 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negar yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Hal 11 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membiayai perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Ma Kodim 0622/Kab. Sukabumi bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018, yang ditandatangani Pasi Pers Kapten Inf Iskandar NRP 572974.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketahui Terdakwa a.n Kopda Jakri NRP 31000130050380, Tamudi-2 Pok Tuud Kodim 0622/Kab. Sukabumi tanggal 8 Mei 2018 dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena menjadi satu berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kopda Jakri NRP 31000180050380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 12 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Ma Kodim 0622/Kab. Sukabumi bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018, yang ditandatangani Pasi Pers Kapten Inf Iskandar NRP 572974.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketahui Terdakwa a.n Kopda Jakri NRP 31000130050380, Tamudi-2 Pok Tuud Kodim 0622/Kab. Sukabumi tanggal 8 Mei 2018 dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Laut (KH) Desman Wijaya, S.H, M.H NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Chk U. Taryana, S.H., M.H NRP 636558 serta Mayor Chk Salis Alfian Wijaya, S.H NRP 1102003220779 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk (K)Novi Susanti, S.H, NRP 21930148890774 Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, S.H NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H, M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

U. Taryana, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 1102003220779

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 13 dari 13 hal, Putusan

Nomor : 25-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)